JUDULNYA MANA????

**TUGAS**

**PERENCANAAN PENELITIAN**



**O L E H**

**SYAHBUDIN ( 091601072 ) D/7**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TAHUN 2020**

**~~PERAN PEMERINTAH DIKELURAHAN WABOROBO KOTA BAUBAU DALAM MEWUJUDKAN~~**

**~~PEMERINTAHAN YANG BAIK~~**

**~~BAB. I. PENDAHULUAN~~ A. Latar Belakang**

Sistim pemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintahan yang baik dalam suatu bentuk pemerintahan. Pemerintahan yang baik ini cenderung lebih efektif dan efesien dalam proses dan tujuannya sehingga dikategorikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik diterapkan kesemua Negara karena pemerintahan yang baik dapat menyeimbangkan keselarasan pemerintah dengan pihak lain diberbagai sektor untuk menciptakan suatu keteraturan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerja sama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu,diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan,anggaran,tujuan serta target kinerja yang jelas dan

terukur. Pemerintah daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan publik harus pula diiringi dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik. prinsip prinsip dari pemerintahan yang baik adalah prinsip efektifitas(effectifeness), keadilan(equity), partisipasi(participation), akuntabilitas(accountability),dan transparansi(transparency). Kelurahan waborobo dengan luas wilayah 17,28 km2 dan jumlah penduduk 984 jiwa merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat pemerintah daerah kota bau- bau dibawah kecamatan betoambari dan bertanggung jawab kepada camat betombari.Kelurahan waborobo mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Hubungan kerjasama dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan waborobo ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna,berhasil terhadap pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Dalam melaksanakan perannya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,pihak pemerintah kelurahan waborobo terlebih dahulu melihat semua factor kemungkinan yang ada baik itu kesempatan,peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada diera otonomi daerah ini serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah menjawab serta memenuhi

kehendak pelanggan yaitu masyarakat dikelurahan waborobo yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan good governance dikantor kelurahan waborobo.

DESKRIPSIKAN SINGKAT, PADAT DAN JELAS GOOD GOVERNANCE YANG ADA DIKELURAHAN WABOROBO????

**B. Rumusan Masaalah**

1. Bagaimana peran pemerintah dikelurahan waborobo dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya

2. Kendala apa saja yang dihadapi aparat pemerintah dikelurahan dalam memberikan pelayanan publik.

**C. Tujuan Penulisan**

Agar penulis dapat mengetahui tentang sistim pelayanan pemerintah dikantor kelurahan waborobo kepada masyarakat apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perannya dan penulis juga dapat menambah pelajaran dilapangan langsung atau menimba ilmu dari proses penelitian ini.

APA MAKSUD DARI ADANYA TUJUAN PENULISAN, JELASKAN???

**~~BAB. II. KAJIAN PUSTAKA~~ A. Konsep Peran**

Dalam kehidupannya setiap manusia masing masing memiliki peran dan fungsi menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya setiap manusia mempunyai cara atau sikap yang berbeda-beda.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut :

1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan;

2. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut,

3. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan,

4. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas,

5. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah

masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible,

6. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*),

7. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat,

8. Peran merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang

perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

**b. Konsep Pemerintahan**

Pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa acara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah, sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik juga merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala

kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara.

Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah (PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah. Menurut Adam Smith, pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

a.Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri., b.Menyelenggarakan peradilan,

c.Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Seorang tokoh indonesia Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan menyebutkan peran dan fungsi pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire* namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurusi segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisionalis. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Ryas Rasyid membagi fungsi pemerintah manjadi empat bagian yaitu :

1. Fungsi pelayanan public,perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing.Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah

mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan,

2. Fungsi Pengaturan (*regulation*) fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis,seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif,

3. Fungsi Pembangunan (*development*) pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya,

4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*) fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan

Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

**~~c. Konsep Kepemerintahan~~**

**~~Yang Baik~~**

Kepemerintahan Yang Baik merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka . Disisi lain istilah kepemerintahan yang baik menurut Dwi Payana (2003:45)

merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi Kepemerintahan Yang Baik (Dwi Payana, 2003:47) lainnya adalah sebagai berikut: “Kepemerintahan Yang Baik” di artikan sebagai “tata pemerintahan yang baik” dan ada pula yang mengartikannya sebagai “sistem pemerintahan yang baik”. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah “governance” sebagai proses penyelenggaraaan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*. Sedangkan arti “*good*” dalam “*good gevernace*” mengandung dua pengertian, *pertama* ; nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembngunan, berkelanjutan dan keadilan sosial, yang *kedua* ; aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut “*good governance*” atau kepemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian Kepemerintahan Yang Baik didefinisikan sebagai “penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertangung jawab,serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara wilayah - wilayah Negara, sektor swasta dan masyarakat”.Menurut Riswanda Imawan (2002:32) kepemerintahan yang baik “*good governance*” diartikan

sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*). Menurut Sedarmayati (2003:76) kepemerintahan yang baik *(good governance)* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of chance*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat yang semakin maju dan sangat berkembang. pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep kepemerintahan yang baik masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek kepemerintahan yang baik adalah seni pemerintah yang berpijak pada *rule of law* dengan elemen transparansi (*transparency)*, akuntanbilitas (*accountability*), *fairness*, dan *responsibility*. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa kepemerintahan yang baik adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya. Dari sudut pendekatan sistim menurut Pulukadang (2002:34), kepemerintahan yang baik menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal Pengambilan keputusan (*decision making)* dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai

suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administrativ governance*).

Konsep kepemerintahan yang baik pada suatu gagasan adanya saling (*interdependence*) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif,

,yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Dengan kata lain, didalam kepemerintahan yang baik hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsip-prinsip transparansi,akuntanbilitas publik dan pertisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan aktor- aktor didalamnya.

**~~BAB. III. METODE PENELITIAN~~**

**a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan

pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong,2001:31) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Grana,

2009:32).

**b. Variabel Penelitian**

Yang menjadi Variabel dari penelitian ini adalah peran lurah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, yang di kaji melalui:

1. Peran lurah dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka

2. Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

3. Peran lurah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengendepankan prinsip keadilan hukum (Rule of Law).

4. Peran lurah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik di

Kelurahan, berdasarkan tugas dan kewajiban.

JELASKAN APA ITU VARIABEL??

BERAPA VARIABEL??

VARIABEL APA SAJA???

**c. Devinisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran tulisan ini,maka diberikan devinisi operasional bahwa untuk mencapai pelayanan publik

dikantor kelurahan dari lurah sampai staf-stafnya harus saling kerja sama dalam memberikan pelayanan yang efektif,efisien dan akuntabel pada masyarakat kelurahan waborobo.

**d. Populasi dan Sampel**

1. populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Pegawai negri sipil jumlah 6

Orang dan pegawai Tenaga honorer jumlah 10 orang di kantor kelurahan waborobo.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,menurut pengamatan Arikunto(2010;173)yang menyatakan apbila populasi kurang dari 100 orang maka diambil dari keseluruhannya,Namun apabila poulasinya lebih dari 100 orangmaka sampel diambil sebesar

10,20,25 % atau lebih. Dalam penelitian ini diambil sampel dan juga sebagai informan dari beberapa pegawai PNS dan tenaga kontrak dikantor kelurahan.

**e. Sumber Data**

~~Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “Purposive” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah:~~

~~1. Lurah waborobo~~

~~2. sekretaris kelurahan waborobo~~

~~3. Staf Kelurahan waborobo~~

~~4. Beberapa masyarakat Kelurahan yang pernah mengurus surat-surat diKelurahan waborobo.~~

**f. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi , wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiyono,

2007:147). Ada 2 pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian terhadap obyek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara, serta melakukan pengamatan secara langsung (Observasi). Metode wawancara adalah metode yang mencoba menjelaskan fakta dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada obyek yang diteliti (informan). Sedangkan observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati langsung disertai dengan pencatatan data yang diperlukan.

2. Data Sekunder, pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber yang berhubungan dengan yang diteliti berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, artikel serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yangditeliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2001 : 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai,

analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| laporan | penelitianUntuk mendapatkan hasil | yang | optimal | dan |
| objektif | sesuai dengan tujuan penelitian. |  |  |  |

**g. Tehnik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data dekskritif berupa kata kata tertulis dari orang-orang dan prilaku yang diamati ini menurut Bogdan dan Taylor. Beberapa tahapannya yaitu

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap para informan dan langsung kelapangan untuk menunjang penelitian dan mendapatkan sumber yang dharapkan,

2. Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan transformasi data, untuk memilih informasi mana dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masaalah yang menjadi pusat penelitian.

3. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verivikasi yang mencari arti pola-pola penjelasan,konfigurasi,yang mungkin,alur sebab akibat dan proposisi.penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat sehingga data-data dapat teruji.

**DAFTAR PUSTAKA**

Moleong, lexi 2001. Metodologi penelitian kualitatif, penerbit Remaja rosda karya.Grana,Judistira k, 2009 Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi ke tiga,bandung ; Primaco Akademika gama Fondation.

Arimbi,Ahmad santosa, 2003 , Peran serta masyarakat Dalam pengelolaan

Lingkungan, Jakarta : walhi.

Dwipayana, AAGN, Ari 2003, Membangun Good Governance , Raja grafindo pustaka, Jakarta.

Zulcarnain, Happy bone 2002,Artikel

Sugiono, prof Dr, 2007, Memahami penelitian kualitatif, Alfa beta; Bandung

Sumber-sumber lain :

- UU no. 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah

- UU no. 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah

**TIDAK MEMENUHI SYARAT**

**PLAGIASI TIDAK DIEDIT, SANGAT VATAL**